

**KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATRA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:**

**BELLA WAHYUNI SARI  
NIM : 105180017**

**Pembimbing :**

**Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I  
Nofi Nurman S.Pd.,M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Juanda
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Juanda

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi

Jambi, Agustus 2022



Bella Wahyuni Sari  
NIM : 105180017



KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu(S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2022

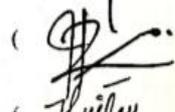
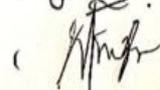
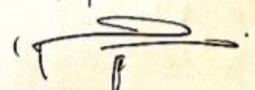
Mengesahkan:

Dekan,



Ulhasyulijana, S.Ag.,MH  
NIP. 2014022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	:	Drs. Rahmadi, M.H.I NIP.19666111219993021001	(  )
Sekretaris Sidang	:	Awaluddin, S.Ag NIP.196401121994011001	(  )
Penguji I	:	Dr. Irmawati Sagala, S.IP.,M.Si.,MSHS NIP. 198010012009012009	(  )
Penguji ii	:	Neni Triana, S.E., M.S.I NIP.197202022014112004	(  )
Pembimbing I	:	Dr. Yuliatian, S.Ag., M.H.I NIP. 197407182000032002	(  )
Pembimbing II	:	Nofi Nurman, M. Si NIDN. 2010118703	(  )

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”(QS : Al Anfal ayat 27)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Saifuddin

## ABSTRAK

**Nama :**Bella Wahyuni Sari

**NIM :** 105180017

**Judul:** *Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan*

**Abstrak:**Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang, kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kualitatif, dengan melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa model induktif, yaitu analisa yang dimulai dari dari reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Pengambilan data ini dilakukan di kantor Bappeda Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan. Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Bappeda melaksanakan penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan melalui 6 tahapan penyusunan RPJMD yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rncangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan RPJMD. Faktor yang menghambat penyusunan RPJMD 2018-2023 yaitu terbatasnya SDM perencana yang berkualitas, penggunaan teknologi yang tidak dapat maksimal, kurangnya koordinasi antar isntansi terutama pada OPD, sarana dan prasarana yang tidak memadai, sedangkan faktor yang mendukung dalam penyusunan RPJMD yaitu Kerja sama tim yang baik disertai motivasi, inovasi dan pemerian reward dari atasan jika melakukan kinerja dengan baik, adanya anggaran dana atau bantuan dana untuk melaksanakan pembangunan dan kelengkapan administrasi dalam penyusunan RPJMD. Kinerja Bappeda Empat lawang dalam penyusunan RPJMD sudah bisa dikatakan baik, melalui pengukuran indikator kinerja, yaitu responsivitas, produktivitas, kualitas layanan, responsibilias, dan akuntabilitas.

**Kata Kunci :** Kinerja, Penyusunan RPJMD, Perencanaan Pembangunan

## ABSTRACT

**Name :**Bella Wahyuni Sari

**NIM :** 105180017

**Title :** *Performance of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) in the Preparation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Empat Lawang Regency, South Sumatra Province*

**Abstract:**This thesis aims to find out the process of preparing the 2018-2023 RPJMD for Empat Lawang Regency, the performance of Bappeda in the preparation of the 2018-2023 RPJMD and to find out the inhibiting and supporting factors for Bappeda's performance in the preparation of the RPJMD. This study uses qualitative research methods and qualitative approaches, by going through the stages of observation, interviews and documentation. As well as data collection techniques in this study using an inductive model analysis technique, namely the analysis starting from data reduction, data presentation, data verification. This data collection was carried out at the Bappeda office of Empat Lawang Regency, South Sumatra Province. The conclusions from this study show that: Bappeda carries out the preparation of the RPJMD based on Permendagri Number 86 of 2017 and goes through 6 stages of RPJMD preparation, namely preparation preparation, preparation of the initial RPJMD draft, preparation of the RPJMD draft, implementation of the Musrenbang, formulation of the final draft, determination of the RPJMD Factors that hinder the preparation The 2018-2023 RPJMD, namely the limited quality of planning human resources, the use of technology that cannot be maximized, the lack of coordination between agencies, especially in the OPD, inadequate facilities and infrastructure, while the factors that support the preparation of the RPJMD are good teamwork accompanied by motivation, innovation and giving rewards from superiors if they perform well, the existence of a budget or financial assistance to carry out development and administrative completeness in the preparation of the RPJMD. The performance of Bappeda Empat Lawang in the preparation of the RPJMD can be said to be good, through the measurement of performance indicators, namely responsiveness, productivity, service quality, responsibility, and accountability.

**Keywords:** Performance, RPJMD Preparation, Development Planning

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan**” serta beriring sholawat dan salam terhaturkan pula kepada kekasih Allah SWT yaitu Baginda Rasulullah nabi Muhammad SAW.

Dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis hadapi dalam upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, berkat kerjasana dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis yaitu Ibu Yuliatin S.Ag., M.H.I dan Bapak Nofi Nurman,S.Pd.,M.Si.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I., M.A., M. IR., Ph.D., Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak DR. Ruslan Abdul Gani, S.H, M. Hum., Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak DR. H. Ishaq, M. Hum, Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.I.P., M. Si dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I, M. Hum, Sebagai Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibu Dr. Yuliatin,S.Ag., M.H.I dan Bapak Nofi Nurman S.Pd., M.si Sebagai Pembimbing 1 dan Pembimbing II Skripsi ini.
8. Bapak Dan Ibu Dosen, dan Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

10. Keluarga Rumah Qur'an Mulia untuk ummah Rasyiqah Rezani S.Hum, abuya Endang Rukmana, Lc terimakasih sudah merangkulku, memberikan wadah untuk diriku belajar al-qur'an. Untuk ustazah tersayang ustazah Miswari terimakasih atas kesabaranmu.

11. Ungkapan sayang dan terimakasih juga untuk teman-temanku Rani Al-Khoirunnisa, Asri Sukmawina, sahabat Rumah Qur'an Mulia, Rumah Hikmahyang telah menemani selama ini

Di samping itu, didasari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Subhanahu wata'ala kita senantiasa memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita saling memberi manfaatnya. Semoga amal kebajikan kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wata'ala.

Jambi, Agustus 2022

Penulis



Bella Wahyuni Sari

Nim. 105180017

## PERSEMBAHAN

*Dengan Mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Shalawat beserta salam tidak lupa pula kukirimkan kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW.*

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua tercintaku Ayahanda Johar Mansyah dan Ibunda Rossa Lina terimakasih yang tak terhingga untuk kalian berdua yang telah mendidik, mengasuh dan melimpahkan seluruh kasih sayang serta do'a dan perjuangan yang tidak kenal lelah hingga saat ini sehingga aku dapat mencapai pendidikan di tingkat ini. Semoga seluruh keluh kesah dan air mata kalian menjadi aliran sungai yang mengalir di surga Firdaus. Amin*

*Ku persembahkan juga untuk adik-adikku Bayu Anshor Mursalin, Betta Mulya Wijaya, Berlian Rizki Agung yang menjadi penyemangat dalam setiap langkahku. Semoga Allah permudahkan kita dalam menyelesaikan pendidikan ini jadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua.*

*Ungkapan Terimakasih juga kepada Keluarga besarku terutama bibik ema susanti sebagai panutan, guru, penasihat, penyemangatku semoga Allah balas semua kebaikanmu di dunia dan akhirat.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka Teoritis .....	16
1. Teori Kinerja Organisasi.....	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambai
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambai

2. Teori Pembangunan .....	21
3. Teori Perencanaan Pembangunan Daerah.....	22
B. Kerangka Konseptual .....	23
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .....	23
2. Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	27
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28
1. Profil Singkat Bappeda Empat Lawang .....	28
2. Tugas dan Fubgsi Bappeda Empat Lawang .....	28
3. Struktur Organisasi Bappeda Empat Lawang .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Proses Penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan.....	38
B. Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendukung Kinerja Bappeda dalam Penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang ...	52
C. Kinerja Bappeda dalam Penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURICULUM VITAE</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian.....	12
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat, Esselon ..	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	
Lampiran 2 :DokumentasiPenelitian .....	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, hal ini dilakukan demi mewujudkan cita-cita nasional negara Indonesia yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam UUD 1945 Alinea ke-4. Agar pembangunan bisa terlaksana secara terarah dan terpadu maka diperlukan suatu perencanaan yang sangat matang. Perencanaan di definisikan dalam arti yang berbeda-beda. Dalam arti yang paling sederhana perencanaan merupakan suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan.<sup>1</sup> UU No.25 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 Tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.<sup>2</sup>

Perencanaan pembangunan disusun untuk memecahkan sebuah masalah sehingga bisa menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan maka disetiap daerah pasti akan ada tantangan yang berbeda-beda.

<sup>1</sup> Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan daerah teori dan aplikasi*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm.2

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 25 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Tahun 2004.

Dalam menyelenggarakan dan yang akan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah yaitu kepala daerah yang akan dibantu oleh kepala Bappeda. Hal ini sudah ditegaskan dalam UU No.25 Tahun 2004 pasal 23 bahwa “ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda”.

Tugas pokok dari badan perencanaan pembangunan (Bappeda) yaitu untuk melaksanakan penelitian, perencanaan dan pengembangan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan di daerah Kabupaten Empat Lawang, tidak terlepas dari kemampuan kepala daerahnya yang disebut dengan Bupati. Bupati sebagai kepala daerah di Kabupaten Empat Lawang memegang kekuasaan tertinggi dalam rangka menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan mengatur seluruh masyarakat. Tugas dan kewajiban bupati sebagai kepala daerah sangat begitu luas, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bupati Empat Lawang tidak dapat melakukan tugas dan fungsi yang dimilikinya dengan sendiri, oleh sebab itu bupati akan dibantu oleh Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Agus Iskandar, Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Dibiidang Pembangunan, “ *Keadilan Progresif*”, Vol.3, No.1 (2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Empat Lawang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk bidang perencanaan dan pembangunan di daerah yang di pimpin oleh seorang kepala badan yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten Empat Lawang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Empat Lawang untuk periode 5 Tahun terhitung sejak tahun 2018-2023 yang mengacu pada visi dan misi kabupaten Empat Lawang yaitu terwujudnya Empat Lawang menjadi kabupaten MADANI (Makmur Aman Damai Nasionalis dan Indah) melalui usaha peningkatan kualitas SDM dan Peningkatan Perekonomian.<sup>4</sup>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direncanakan dan telah dilaksanakan memiliki sasaran, strategi, dan arah kebijakan masing-masing agar tujuan pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Empat Lawang bisa terwujud. Untuk mewujudkan target pembangunan diperlukan fokus pada penanganan masalah yang spesifik dan sangat mendasar sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Meskipun RPJMD telah disusun dengan beberapa prioritas pembangunan namun pembangunan di kabupaten Empat Lawang masih dirasakan belum maksimal dan tidak merata. seperti program pembangunan gardu PLN di KM 12 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sudah 7 tahun terhitung sejak tahun 2013-sekarang terbengkalai sehingga seringkali terjadi

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Wika Patriana Butal, Bidang Pengendalian Monev dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, Tanggal 21 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



pemadaman listrik dan tidak stabil mengakibatkan masyarakat mengeluhkan pelayanan PLN dan tidak jarang membuat alat-alat elektronik rusak.<sup>5</sup>

Selain itu masih rendahnya akses sanitasi rumah tangga yang layak yang meliputi persampahan, drainase dan limbah (limbah rumah tangga, dan limbah tinja) sangat memerlukan bisa dikatakan masih belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan sarana sanitasi yang layak masih relatif rendah tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 usaha pembangunan sanitasi hanya mencapai 37,12% sedangkan sanitasi merupakan salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat karena sangat berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan pemukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direncanakan dan telah dilaksanakan memiliki sasaran, strategi, dan arah kebijakan masing-masing agar tujuan pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Empat Lawang bisa terwujud, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala, sehingga target dan sasaran RPJMD tidak terlaksana dengan maksimal.

Maka berdasarkan uraian-uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian sudah sejauh manakah **KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

<sup>5</sup> Observasi, 25 Maret 2021

<sup>6</sup> Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, 2018

## DAERAH (RPJMD) KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATRA SELATAN.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan di angkat dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja organisasi Bappeda dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Provini Sumatra Selatan?
3. Bagaimana Kinerja Bappeda dalam penyusunan Rencanan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar penelitian ini pembahasannya tidak meluas dan mengambang, maka batasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Empat Lawang tahun 2018-2023.

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses-proes penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan

3. Untuk mengetahui kinerja Bappeda dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai :

1. Sebagai bentuk sumbangan hasil pemikiran dari penulis untuk para pembaca maupun masyarakat luas mengenai Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu yang telah di dapatkan selama duduk di bangku perkuliahan.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman agar nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa, sehingga dapat membandingkan teori-teori dengan kenyataan yang ada dilapangan, khususnya bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
4. Untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## E. Metode Penelitian

### a. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1) Tempat

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian maka peneliti akan melaksanakan penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. karena Bappeda Empat Lawang yang mempunyai tugas pokok serta fungsi peranan sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

#### 2) Waktu

Adapun waktu dalam penelitian ini akan menyesuaikan dengan surat riset yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Syari'ah, UIN Sutha Jambi. Minimalnya waktu dalam melaksanakan penelitian kualitatif yaitu berjarak 3 bulan. Penelitian ini dilakukan sejak disahkan nya penelitian, yaitu pada bulan Januari dimana kegiatan penelitian dilakukan pada jam kerja yaitu di mulai dari jam 08.00-16.00 WIB.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang akan memperoleh data deskriptif seperti kalimat-kalimat yang tertulis ataupun diucapkan secara lisan dari perilaku atau dari orang-orang yang akan diamati.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011). hlm. 4.

Penelitian ini memiliki sifat analisis deksriptif (*deskriptif analysis*). Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya, menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Adapun tujuannya adalah memberikan suatu gambaran terkait situasi yang terjadi dengan menggunakan data yang bersifat deksriptif.<sup>8</sup>

### c. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer mencakup semua informasi, kebenaran dan realitas yang terkaitataurelevandenganpenelitian, dimanakaitanataupun relevansi nya sangat jelas. Dikatakan menjadi data utama (*primer*) karena data yang tercantum menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian.<sup>9</sup>

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau bisa juga dikatakan data yang diperoleh lewat orang lain

<sup>8</sup>*Ibid*, hal,248

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

atau dokumen. Data sekunder bersifat authentic artinya, data ini didapatkan oleh tangan kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah literature-literature yang dapat mendukung penelitian ini seperti Buku-buku, Jurnal, Karya Ilmiah, Majalah, Koran atau tulisan tulisan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

### d. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Jadi metode pbservasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan secara lisan melalui kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang tepat dan menemukan ide dari sumber yang terpercaya.<sup>11</sup> Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan jawaban daro permasalahan secara terbuka, dan pihak yang diajak wawancaraakan diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi : Syari'ah Press IAIN STS , 2014), hlm.34

<sup>11</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231.

<sup>12</sup>Sugiyono, hlm. 232-233.

Dalam penelitian ini orang-orang yang akan dipilih sebagai informan yaitu :

1. Kepala Bappeda
2. Sekretaris Bappeda
3. Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Litbang
4. Kasubid Pengendalian dan Pelaporan
5. Staf Analisis Kepegawaian

Teknik dalam menentukan informan dalam penelitian ini yaitu akan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik pengumpulan data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Semisalnya informan yang akan diwawancarai adalah orang yang dianggap paling tahu tentang data yang kita butuhkan atau dia yang kita anggap sebagai penguasa untuk memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Maka dari itu, semua informasi yang dikumpulkan berasal dari orang-orang yang kemungkinan besar dapat memberikan wawasan tentang masalah yang dihadapi selama proses penelitian yang diteliti.<sup>13</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 218-219.

<sup>14</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*( Jakarta: Kencana,2017), hlm.391.

### e. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data model induktif, yaitu analisa yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

#### a. Data Reduction (Pengumpulan Data)

Reduksi data adalah merangkum atau mencari isi yang penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah data yang didapatkan telah direduksi maka dapat memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti pada saat akan mengumpulkan data selanjutnya dan memudahkan peneliti ketika data tersebut diperlukan kembali.<sup>15</sup>

#### b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam hal penyajian data dapat disajikan dalam beberap bentuk misalnya, dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan sejenisnya. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif biasanya data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan , memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah di pahami.<sup>16</sup>

#### Conlution Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Menurut Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif setelah proses penyajian data maka, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa

<sup>15</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 2014. Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247.

<sup>16</sup> Sugiyono, hlm. 249.

saja berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya .<sup>17</sup>

#### f. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini untuk mempermudah langkah – langkah dalam penelitian, maka penulis menyusun jadwal penelitian berikut ini :

#### Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022																			
		Juli				Agustus				Januari				Maret				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				X																
2.	Pembuatan Proposal					X	X	X	X												
3.	Perbaikan Proposal dan Seminar						X	X	X												
4.	Surat Izin Riset									X											
5.	Pengumpula Data									X	X	X	X								
6.	Pengolahan dan Analisis Data													X	X	X					
7.	Pembuatan Laporan																X				
8.	Bimbingan dan Perbaikan																X				
9.	Agenda dan Ujian Skripsi																				X
10.	Perbaikan dan Penjilidan																				X

<sup>17</sup>Sugiyono, hlm. 252.

### g. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penjelasan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu atau bisa juga dikatakan bahwa tinjauan pustaka merupakan hasil penelitian-penelitian lain yang ada kaitannya dengan topik atau tema yang akan diteliti.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Hesti Dwi Astutik (Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2019 yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Bappeda dalam Proses Perencanaan Pembangunan Parsipatif di Kota Semarang Tahun 2016.” Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Bappeda Kota Semarang menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah dan kinerja Bappeda Kota Semarang pada tahun 2016 dalam pembangunan Partipatif dapat dikatakan belum optimal karena keberhasilan Bappeda dalam Mengakomodir usulan lebih rendah dari tahun sebelumnya”.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang kinerja Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan, dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus pada kinerja bappeda dan strategi bappeda dalam mengoptimalkan kinerjanya untuk perencanaan pembangunan partispatif kota Semarang sedangkan, penelitian yang akan dilakukan akan lebih terfokus pada kinerja Bappeda dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Empat Lawang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

membahas faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses penyusunan RPJMD tersebut.<sup>18</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nur Sulhana Ali, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar tahun 2018 yang berjudul “Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Makassar”. Hasil penelitiannya adalah jika dipandang secara keseluruhan kinerja pegawai pada kantor Bappeda Kota Makassar sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, inisiatif, kehadiran dan ketepatan waktu, pengetahuan terhadap pekerjaan dan kerja samanya.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kinerja, perbedaannya penelitian ini lebih terfokus kepada kinerja pegawai yang terdapat di kantor Bappeda Kota Makassar sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan fokus kepada kinerja organisasi bappeda itu sendiri.<sup>19</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditemukan adalah skripsi Annisa Dwi M. mahasiswi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD tahun 2018 dengan judul “Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2015-2017” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Lebong tahun 2015-2017 sudah baik meskipun dalam penyusunan RKPD untuk tahun 2015-2017 tidak mendapatkan

<sup>18</sup>Hesti Dwi Astutik, Skripsi :“ *Optimalisasi Kinerja Bappeda dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partipatif Kota Semarang*”(Semarang :Universitas Negeri Malang, 2020), hlm.52

<sup>19</sup>Nur Sulhana Ali, Skripsi : “*Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Makassar*” (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2018)hlm,87

penghargaan dan dalam proses penyusunannya terdapat kendala yang dihadapi secara eksternal maupun internal.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kinerja Bappeda dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan. Perbedaannya penelitian ini lebih terfokus pada kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Lebong, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan terfokus pada kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Empat Lawang, kemudian indikator dalam pengukuran yang digunakan dalam kedua penelitian juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan indikator berupa input, proses, output, outcomes, dan impact. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan indikator pengukuran kinerja berupa produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.<sup>20</sup>

State Islamic University of Suthan Thaha Saifudin Jambi

<sup>20</sup> Annisa Dwi M, Skripsi : “Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2015-1017(Padang : Universitas Andalas, 2018),hlm.66-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suntho Saifudin Jambi

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kerangka Teori

#### 1. Kerangka Teoritis

Dalam melaksanakan sebuah penelitian maka diperlukan kerangka teori sebagai pedoman untuk menjamin diperolehnya hasil yang benar dan tepat selama penulisan skripsi. sebagaimana yang telah dijelaskan Ronny Hanitijo bahwa setiap penelitian mesti disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis.<sup>21</sup> Maka dari itu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Teori Kinerja Organisasi

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>22</sup> Melakukan kinerja yang baik merupakan langkah agar mudah tercapainya tujuan dalam organisasi. Sehingga upaya dan usaha untuk meningkatkan suatu kinerja sangat diperlukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahqaf Ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقَّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾<sup>23</sup>

“ Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, sedang mereka tidak dirugikan.”

<sup>21</sup>Ronny Hatinijo Soemetro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12

<sup>22</sup>Agus Dwiyanto dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 45

<sup>23</sup>*Syamil Qur'an, Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), 502

Dalam ayat ini telah jelas bahwasannya Allah pasti akan membalas perbuatan setiap manusia berdasarkan apa yang telah ia kerjakan, artinya ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik juga bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari pekerjaannya dan menguntungkan bagi organisasinya.

Pengertian kinerja organisasi menurut Strees adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan sesuai dengan yang direncanakan dan capaian misi organisasi dari tersebut.<sup>24</sup> dari beberapa definisi diatas dapat difahami bahwa kinerja organisasi merupakan usaha dalam meningkatkan kemampuan dalam hal pelaksanaan tugas-tugas organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program atau kebijakan atau visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Konsep dalam kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengukuran kinerjanya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada, agar dapat mengetahui apakah organisasi tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan dapat mengetahui tujuan dari organisasi tersebut telah tercapai atau belum.<sup>25</sup>

Ketika membahas mengenai kinerja pasti akan berkaitan dengan ukuran atau standar kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting bagi suatu organisasi karena penilaian tersebut digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. indikator kinerja merupakan kriteria-

<sup>24</sup> Richard M. Strees, *Efektivitas Organisasi*, ( Yogyakarta : Library Congres, 2003)hlm.67

<sup>25</sup><http://indraachmadi.blogspot.com/2012/04/kinerja-organisasi.html>

kriteria yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi yang diwujudkan dalam ukuran tertentu.

Menurut Agus Dwiyanto indikator-indikator dalam kinerja organisasi publik terbagi menjadi 5 yaitu :

#### 1. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan melaksanakan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

#### 2. Produktivitas

Dalam konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi juga efektivitas dalam pelayanan.

#### 3. Kualitas Layanan

Dalam pelayanan publik kualitas pelayanan merupakan hal yang penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Kepuasan dari masyarakat bisa menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik.

#### 4. Responsibilitas

Dalam hal ini responsibilitas merupakan hal yang dapat menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu telah dilakukan sesuai prinsip-prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplit maupun implisit.

## 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dapat menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik ini tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Artinya bahwa para pejabat tersebut berdiri karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.<sup>26</sup>

Setiap organisasi mempunyai tujuan. Salah satu sasaran organisasi untuk mencapai tujuan adalah kinerja para anggotanya dalam melaksanakan tugas – tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kedudukan dan peranan masing – masing dalam organisasi. Sebuah organisasi instansi pemerintah merupakan sebuah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik dan dapat memberikan stimulasi yang berpengaruh terhadap banyak orang.

Berhasil atau tidaknya tujuan, sasaran dan cita-cita dalam suatu organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. ketika proses pelaksanaan kegiatan atau program terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi menurut Agus Dwiyanto yaitu :

---

<sup>26</sup>Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008), hlm.51-52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Sarana dan Prasarana, yang merupakan alat penunjang suatu keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik.
2. Sumber Daya Manusia, yang merupakan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi. Organisasi sangat membutuhkan SDM yang berkompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan
3. Koordinasi antar Unit, koordinasi dalam suatu organisasi harus terlaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sehingga terbangunnya koordinasi yang baik antar unit baik itu sesama pegawai maupun dengan pimpinan yang lebih tinggi pada dasarnya akan memberikan manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja.
4. Kelengkapan administrasi, tujuan, susunan, prosedur pada organisasi kantor harus diatur sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kantor tersebut kemudian penyempurnaan kelengkapan organisasi harus sesuai lingkungan
5. Koordinasi dengan instansi lain, koordinasi yang akan dilakukan dengan instansi lain harus berkesinambungan karena suatu organisasi akan saling terkait oleh aturan aturan yang ada, demi untuk peningkatan kinerja suatu organisasi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008), hlm.83

## 2. Teori Pembangunan

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembangunan juga bentuk dari hasil kegiatan dan program pemerintah bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan lainnya dengan cara meningkatkan pembangunan. Beberapa para ahli mendefinisikan arti dari pembangunan, Menurut Sondang P.Siagian Pembangunan merupakan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa.<sup>28</sup>

Kemudian menurut Ginanjar Kartasasmita pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.<sup>29</sup>Sedangkan menurut Effendi pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.<sup>30</sup>

Secara umum, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh para birokrat perencana pembangunan untuk membuat suatu perubahan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

<sup>28</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2009),hlm. 4

<sup>29</sup>Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat, memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta : PT Pustaka Cides Indo, 1994),hlm. 15

<sup>30</sup>Effendi & Bachtiar, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, (Yogyakarta : Unaindo dan Offset ,2002),hlm.2

### 3. Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu arahan dalam penggunaan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Di negara berkembang terutama di Indonesia perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk membangun suatu daerah karena pembangunan daerah merupakan bagian internal dalam perencanaan pembangunan nasional maka penyusunan perencanaan yang matang sangat diperlukan. Alasannya karena potensi yang dimiliki oleh setiap daerah itu berbeda-beda baik dari segi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu alasan lain yang cukup penting adalah bahwa, pada perencanaan pembangunan nasional, peranan pemerintah daerah tidak terlalu menonjol seperti sam halnya dengan pemerintah pusat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan daerah motor utamanya adalah pemerintah daerah sendiri.

Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga mungkin dapat ditangkap secara cepat. Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

sehingga kehidupan lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan.<sup>31</sup>

Pembangunan daerah yaitu seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah yang meliputi aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Perencanaan pembangunan daerah yang dijelaskan dalam

UU Pemerintah Daerah NO.23 Tahun 2014 terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).<sup>32</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan teori-teori yang berkaitan atau konsep yang mendukung dalam penelitian

### 1. Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Perencanaan jangka menengah (Medium-term planning) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dengan masa jabatan presiden atau kelola daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mencakup jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah daerah nasional maupun pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 pasal 15 ayat 2 tentang Tahapan,

<sup>31</sup> Ali Kabul Mahi & Sri Indah Trigunarso, *Perencanaan pembangunan Daerah (teori & aplikasi)*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 45-48

<sup>32</sup> UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yaitu masa penyusunan RPJMD maksimum enam (6) bulan sesudah kepala Daerah resmi dilantik.<sup>33</sup>Pemerintah daerah akan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya kemudian melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tersebut”.<sup>34</sup>

Perencanaan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang, sehingga sifatnya lebih operasional. Tata cara penyusunan RPJMD menurut Permendagri No. 86 tahun 2017 yaitu :

1. Persiapan Penyusunan
  - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD
  - b. Orientasi mengenai RPJMD
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD
  - d. Penyiapan data informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)
  - e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan masalah pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lain-lain dan perumusan isu strategis
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, dimulai sejak Kepala Daerah dilantik, mencakup :

<sup>33</sup> PP No.8 tentang *Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah*. Tahun 2008.

<sup>34</sup> PERDA Kabupaten Empat Lawang No.1 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang*. Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD
- b. Penjabaran visi dan misi KDH
- c. Perumusan tujuan dan sasaran
- d. Perumusan strategi dan arah kebijakan
- e. Perumusan program pembangunan daerah
- f. Perumusan program perangkat daerah
- g. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Merupakan penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi serta disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran umum kondisi daerah
- c. Gambaran keuangan daerah
- d. Permasalahan dan isu strategis daerah
- e. Visi, misi, tujuan dan sasaran
- f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
- g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah
- h. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- i. Penutup

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan

program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri mursrenbang RPJMD.

#### 5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

- a. Penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD
- b. Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada sekretaris daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum, paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD
- c. Kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, terdiri dari Ranperda dan rancangan akhir RPJMD paling lambat 9 hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

#### 6. Penetapan RPJMD

- a. Kepala daerah menetapkan Ranperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
- b. Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah kepala daerah dilantik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

- c. Apabila penyelenggaraan pemerintah daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan
- d. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>35</sup>

## 2. Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Republik Indonesia dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia . Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yaitu, Bappeda tingkat I yakni Pemerintahan Provinsi dan Bappeda Tingkat II di Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Bappeda adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijelaskan dalam peraturan KEPRES No. 27 Tahun 1980, pada Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan badan ini berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.<sup>36</sup> Jadi Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam rencana jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.

<sup>35</sup> Permendagri No.86 Tahun 2017

<sup>36</sup> KEPRES No. 27 tentang *Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia*, Tahun 1980.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Profil Singkat Bappeda Empat Lawang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Empat Lawang merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 memiliki Tugas Pokok dan Fungsi menyusun dokumen Perencanaan Daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten Empat Lawang membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Empat Lawang Tahun. Bappeda Empat Lawang terletak di lokasi yang sangat strategis yang beralamatkan di Jl. Lintas Sumatra Km 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Empat Lawang

Bappeda Kabupaten Empat Lawang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 memiliki Tugas Pokok dan Fungsi menyusun Dokumen Perencanaan Daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi BAPPEDA adalah :

1. Pengkajian, Pengkoordinasian dan Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, strategis pembangunan daerah, arah kebijakan anggaran daerah, sektor, lintas sektor dan lintas wilayah, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
2. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
3. Penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integrative dalam penetapan program dan kegiatan pemerintah daerah;
4. Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
5. Pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaah Jambi

7. Pengkoordinasian, Fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan Pembangunan dan pengalokasian dana untuk pembangunan daerah bersama-sama instansi terkait
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh perangkat daerah mitra dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
9. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi satuan organisasi di lingkungan badan
10. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab badan
11. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan badan
12. Pengkoordinasi, Pengendalian, Pembinaan dan Pengharmonisian Perencanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Daerah.<sup>37</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

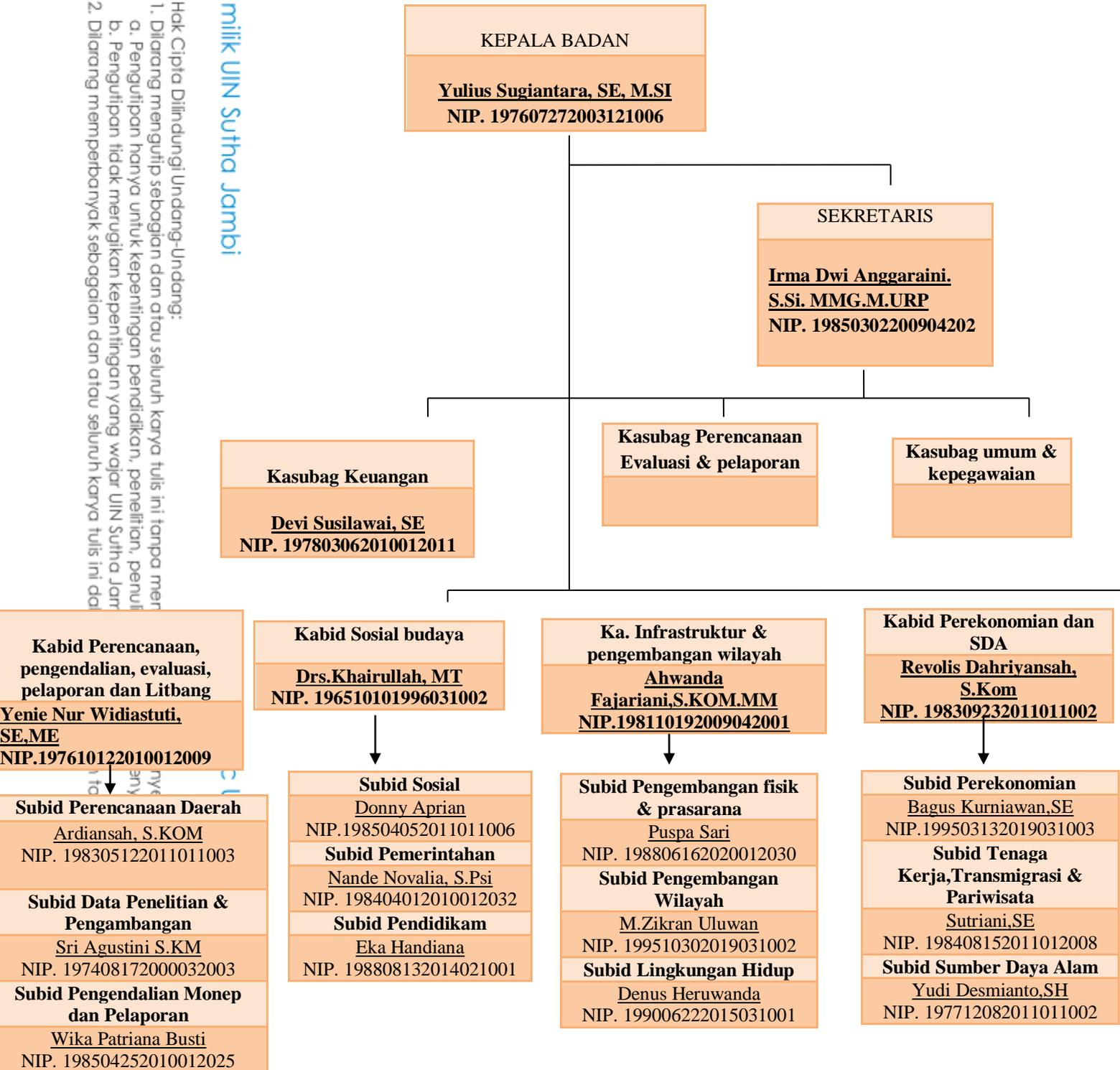
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>37</sup>Dokumen Renstra 2018-2023 Bappeda Empat Lawang

### 3. Struktur Organisasi Bappeda Empat Lawang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa men  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penul  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jam  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini da



Sumber Kantor Bappeda 2022

Untuk menegaskan tugas-tugas pada unsur – unsur organisasi pemerintahan kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Kepala Badan

1. Memimpin Badan;
2. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan perangkat daerah dan instansi lain dalam merancang program dan kegiatan pembangunan daerah
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perumusan rencana dan pengendalian pembangunan daerah
5. Memfasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta dalam dan luar negeri
6. Melakukan administrasi pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
8. Melakukan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan
9. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

### 2. Sekretaris

1. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan badan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan badan
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan
5. Pengkoordinasian dan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah, peraturan Kepala Badan terkait dengan lingkup tanggungjawab badan
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan

**3. Ka Bidang Perekonomian dan SDA**

1. Menyusun program bidang
2. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
3. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja bidang
4. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Pertanian dan ketahanan pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, penyuluh pertanian, dan

koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perindustrian dan perdagangan, pendapatan daerah, keuangan daerah, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi dan pariwisata

5. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA
6. Menyusun dan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA
7. Menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA
8. Menilai prestasi kerja para kepala sub bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
9. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan
10. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala badan.

#### **4. Ka Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

1. Menyusun program bidang
2. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya
4. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang, meliputi urusan fisik dan prasarana, lingkungan hidup, tata ruang, komunikasi dan informasi dan kerja sama pembangunan
5. Menyelenggarakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang, meliputi urusan fisik dan prasarana, lingkungan hidup, tata ruang, komunikasi dan informasi dan kerja sama pembangunan
6. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah bidang meliputi urusan fisik dan prasarana, lingkungan hidup, tata ruang, komunikasi dan informasi dan kerja sama pembangunan
7. Menyusun dan merumuskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
8. Menyusun dan merumuskan Program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang
9. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

10. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan
11. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala badan.

**5. Ka Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan**

1. Menyusun Program Bidang Perencanaan Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan
2. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan tahunan
3. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja bidang
4. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Menyusun dan merumuskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Daerah
7. Menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

8. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
9. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Badan.<sup>38</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Nasional. Berikut ini visi misi KDH dan WKDH terpilih Kabupaten Empat Lawang.

Visi “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI (Makmur, Aman, Damai, Agamis, Nasionalis, Indah) melalui peningkatan Perekonomian dan Kualitas SDM”

Misi :

- 1.Mewujudkan pemerintahan yang efektif , bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- 3.Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

4. Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkuat kemitraan hulu-hilir, serta industry kecil, menengah dan besar.
5. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal.
7. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
10. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang mengenai proses penyusunan RPJMD kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

### 1. Persiapan Penyusunan

Proses persiapan penyusunan dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berikut hasil wawancara mengenai persiapan proses penyusunan RPJMD 2018-2023 :

“Kami membentuk Tim penyusun RPJMD yang disusun di SK dan ditetapkan sebelum pilkada dan terdiri dari stakeholder yang terkait. Tidak hanya bappeda seperti BPS dan akademisi lain juga nantinya akan berkontribusi dengan penyusunan RPJMD bappeda ini sampai dengan tahap akhir. Pada tahun 2018, pilkada dilaksanakan sekitar bulan juli saat itu pilkada belum dilaksanakan secara serentak kemudian, pelantikan bupati dilaksanakan pada desember 2018. Sebelum pilkada kami sudah menyusun rancangan Teknokratik untuk RPJMD yang memang harus disusun sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati dilaksanakan.rancangan teknokratik merupakan rancangan analisis setiap kondisi daerah secara teknokrat. rancangan tenokratik ini yang membahas pembangunan lingkup kabupaten Empat Lawang dengan didampingi oleh akademisi yang kompeten terhadap analisa-analisa daerah itu akan menjadi cikal bakal dari dokumen RPJMD.”<sup>39</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Yulius Sugiantara, SE M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang mengenai persiapan proses penyusunan beliau mengatakan :

“Dimulai dari pembentukan tim RPJMD, kemudian setelah KDH dan sudah WKDH terpilih otomatis mereka ini mempunyai visi misi yang akan diterjemahkan ke dalam dokumen pembangunan 5 Tahun atau RPJMD jadi, sebelum penetapan KDH dan WKDH Bappeda sudah menyusun rancangan teknokratik. Rancangan ini kemudian dibahas oleh

<sup>39</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

tim penyusun RPJMD bersama dengan perangkat daerah. Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD yang selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan rancangan awal Renstra”.<sup>40</sup>

Hal senada juga dikatakan ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid

Pengendalian dan Pelaporan :

“Dalam persiapan penyusunan maka langkah pertama adalah membentuk tim penyusun, kemudian akan disusun agenda kerja tim tersebut. setelah melaksanakan proses ini maka bappeda akan membuat rancangan teknokratik atau rancangan analisis gambaran umum kondisi daerah dimana rancangan teknokratik ini dibuat sebelum terpilihnya KDH dan WKDH Empat Lawang 2018, dalam pembuatan rancangan teknokrat Bappeda melibatkan perangkat daerah atau akademisi yang kompeten terhadap analisa kondisi Empat Lawang. Dokumen teknokratik ini nantinya akan menjadi dasar dokumen rancangan awal RPJMD”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat dicermati bahwa proses persiapan penyusunan RPJMD 2018-2023 dimulai dari pembentukan tim penyusun dan agenda kerjanya yang sudah disusun sebelum pilkada, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Dalam penyusunan teknokratik ini melibatkan akademisi yang kompeten terhadap analisa-analisa daerah yang nantinya akan menjadi rancangan cikal bakal dokumen RPJMD.

<sup>40</sup> Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>41</sup> Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



*Dokumentasi pembuatan Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-20223*

## 2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Setelah pembentukan tim dan penyusunan rancangan teknokratik maka tahapan selanjutnya yaitu Penyusunan rancangan awal RPJMD. Berikut hasil wawancara mengenai Penyusunan Rancangan awal RPJMD 2018-2023 :

“Setelah pelantikan KDH dan WKDH terpilih dari hasil pilkada pada bulan September kami melanjutkan dokumen teknokratik menjadi Rancangan awal RPJMD. Rancangan awal ini sudah mengkaitkan antara naskah rancangan teknokratik yang sudah disusun dengan visi misi KDH dan WKDH terpilih. Kemudian visi misi KDH yang terpilih kami kolaburasikan ke Rancangan awal RPJMD. Setelah itu tim langsung mengintegrasikan visi misi tersebut kedalam dokumen Rancangan Awal RPJMD, visi dari KDH dan WKDH terpilih adalah menjadikan Kabupaten Empat Lawang menjadi kabupaten MADANI melalui peningkatan SDM dan perekonomian dan mempunyai 10 misi yang kemudian kami terjemahkan kedalam dokumen perencanaan yang menjadi indikator-indikator yang mudah diukur menjadi kinerja penterjemahan visi misi dalam bentuk kinerja kedepan. Kemudian rancangan awal RPJMD ini akan dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui *forum konsultasi publik* paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD ini disusun. Tim penyusun RPJMD terus bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi yang memadai terhadap penyusunan dokumen. Waktu itu kami didampingi oleh tenaga fungsional Perencana dari Bapenas pusat agar sistematis maupun substansi yang kami rumuskan dalam dokumen RPJMD sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam sebuah penyusunan dokumen RPJMD.”<sup>42</sup>

<sup>42</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Yulius Sugiantara, SE M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang mengenai penyusunan rancangan awal RPJMD beliau mengatakan :

“Setelah tahapan teknokratik, KDH dan WKDH dilantik kemudian kami masuk ke rancangan awal. Dari rancangan awal kami langsung memerintahkan perangkat daerah yang akan membreakdown rancangan awal RPJMD itu dan berkolaborasi menyusun rancangan awal Renstra yang juga bersifat 5 tahun. Jika RPJMD 5 tahun lingkup kabupaten sedangkan renstra jangkanya 5 tahun tapi cakupannya hanya perangkat daerah masing-masing. Sebelum melakukan musrenbang RPJMD kami melakukan konsultasi publik yang bertujuan mempublikasikan, menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dikabupaten empat lawang seperti unsur vertikal kemudian lembaga, organisasi, masyarakat itu sendiri, sektor pendidikan, sektor kesehatan, itu kami undang dalam satu forum yg dinamakan forum konsultasi publik. Dalam konsultasi publik ini kami mempublikasikan rancangan awal RPJMD yang sudah kami susun mengenai kesesuaiannya kemudian breakdown terhadap visi misi yang sudah dirumuskan kemudian akan dimita persetujuan. Jadi pemangku kepentingan yang hadir akan diminta untuk memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran dan indikatornya termasuk strategi dan arah kebijakan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal dan termasuk prioritas yang diusung dalam RPJMD apakah sudah sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. kemudian masukan mereka akan dituangkan dalam berita acara yang akan dijadikan dasar penyempurnaan dokumen rancangan awal RPJMD termasuk rancangan awal Renstra perangkat daerah.”<sup>43</sup>

Hal senada juga dikatakan ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid

Pengendalian dan Pelaporan :

“Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak KDH dan WKDH terpilih dilantik, dalam pembahasan rancangan awal RPJMD kami melibatkan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik yang kami laksanakan 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun. Para pemangku kepentingan ini dilibatkan dengan tujuan agar nantinya dapat memberikan masukan mengenai tujuan, sasaran dan indikatornya termasuk strategi dan arah kebijakan yang sudah di rumuskan dalam rancangan awal RPJMD tadi. Setelah rancangan awal ini di konsultasi publikan, kemudian akan dibawa ke DPRD untuk dibahas dan disetujui.

<sup>43</sup> Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE., M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

Setelah dari DPRD setuju maka dokumen ini akan dibawa ke Gubernur Sumatra Selatan untuk dikonsultasikan dan mendapatkan saran penyempurnaan, kemudian saran penyempurnaan ini lah yang menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, yang akan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat dicermati bahwa dokumen teknokratik akan disempurnakan menjadi Rancangan awal RPJMD, dalam dokumen rancangan awal RPJMD terdapat penjabaran visi misi dari KDH dan WKDH terpilih. dalam pembahasan dokumen rancangan awal RPJMD Bappeda Empat Lawang telah melaksanakan forum konsultasi publik 30 hari setelah KDH dan WKDH terpilih dilantik, yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran dan indikator serta strategi arah kebijakan yang sudah dirumuskan dalam dokumen rancangan awal RPJMD. Kemudian hasil pembahasan ini akan dibawa ke DPRD untuk m<sup>45</sup>endapatkan persetujuan dan teruskan kepada Gubernur Sumatra Selatan untuk mendapatkan saran penyempurnaan dokumen RPJMD yang akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.



*Dokumentasi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik*

<sup>44</sup>Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>45</sup> Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kapala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

### 3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan Rancangan RPJMD merupakan penyempurnaan dokumen rancangan awal RPJMD yang sudah disajikan dengan sistematika penulisan dokumen rancangan RPJMD. Sebagaimana hasil wawancara yang menjelaskan proses Penyusunan rancangan RPJMD yaitu :

“Setelah rancangan awal RPJMD disempurnakan dan rancangan Renstra PD telah diverifikasi, kemudian kedua dokumen ini digabungkan untuk dijadikan rancangan RPJMD, rancangan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh Bupati Empat Lawang untuk menyelenggarakan Musrenbang RPJMD. Persetujuan ini paling lambat 70 hari setelah Bupati terpilih tersebut dilantik”<sup>46</sup>

Begitu pula yang dikatakan Bapak Yulius Sugiantara, S.E.,M.SI selaku Kepala Bappeda mengenai penyusunan rancangan RPJMD :

“Dari dokumen rancangan awal RPJMD dan rancangan awal Renstra perangkat daerah tadi kemudian akan dijadikan satu untuk dijadikan dokumen rancangan RPJMD, kemudian dokumen rancangan RPJMD ini di ajukan lagi kepada KDH terpilih untuk mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakannya Musrenbang RPJMD ini”<sup>47</sup>

Hal senada juga dikatakan ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan :

“Dokumen rancangan RPJMD dibuat berdasarkan dokumen rancangan awal RPJMD dan rancangan awal Renstra Perangkat daerah, yang selanjutnya masuk ketahapan ke 4 penyusunan RPJMD yaitu pelaksanaan Musrenbang melalui persetujuan dari Bupati terpilih, untuk mendapatkan persetujuan dokumen RPJMD yang akan di Musrenbangkan ini paling lambat 70 hari setelah Bupati dilantik.”<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

<sup>47</sup> Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>48</sup> Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa dari dokumen rancangan awal RPJMD dan rancangan awal Renstra disempurnakan menjadi dokumen rancangan RPJMD yang akan di Musrenbangkan melalui persetujuan dari KDH terpilih Empat Lawang.

#### 4. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Berikut hasil wawancara mengenai Pelaksanaan Musrenbang :

“Musrenbang RPJMD hampir sama sifatnya dengan konsultasi publik. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang yaitu DPRD, ketua pimpinan, ketua fraksi , seluruh perangkat daerah di Empat Lawang, lembaga organisasi, wartawan, guru (kepala sekolah), kepala desa, tenaga kesehatan, kelompok-kelompok tani karna pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi maka dari itu perwakilan kelompok tani mempunyai persentase lebih tinggi sehingga masukan dari mereka menjadi penyempurnaan dokumen. Musrenbang dilaksanakan hanya sehari setelah 75 hari pelantikan KDH dan WKDH tetapi sebelumnya telah melalui proses pembahasan dengan perangkat daerah, Jadi ketika menyusun Renstra perangkat daerah juga melaksanakan forum konsultasi lintas perangkat daerah kemudian menjaring aspirasi dan menyimpulkan yang nantinya akan menjadi masukan ke kami.”<sup>49</sup>

Begitu pula yang dikatakan Bapak Yulius Sugiantara, S.E.,M.SI selaku Kepala Bappeda mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJMD :

“Kami Melaksanakan musrenbang sekitar bulan april setelah melalui proses pengumpulan data dari tingkat desa ke kecamatan melalui kepala desa. Kemudian dalam musrenbang tingkat kecamatan tersebut kami dari pihak bappeda di undang dan organisasi terkait masing-masing membawa 1 tim penilai tingkat pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, yang menghadadiri pada Musrenbang tingkat kecamatan tentunya yang utama dari bidang PPEP, kemudian ibu sekretaris juga

<sup>49</sup> Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

pada waktu itu ikut menghadiri. Setelah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan maka, akan diadakan rapat Forum Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari Musrenbang tingkat kecamatan tersebut atau yang sudah diverifikasi oleh kecamatan dalam aplikasi SIPD, rapat ini dilaksanakan selama tiga hari. Kemudian Musrenbang pada tingkat Kabupaten kami laksanakan 75 hari setelah pelantikan KDH dan WKDH terpilih. hasil dari Musrenbang tingkat kabupaten ini akan dibuat dalam berita acara yang nantinya menjadi dasar penyusunan dokumen rancangan akhir RPJMD”<sup>50</sup>

Hal senada juga dikatakan ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid

Pengendalian dan Pelaporan :

“Untuk melaksanakan Musrenbang harus mengumpulkam data data terlebih dahulu dimulai dari masyarakat yang menyampaikan kepada tokoh tokoh dalam masyarakat tersebut atau melalui perangkat desa tentang apa yang mereka butuhkan, kemudian dari desa disampaikan oleh kepala desa dalam Musrenbang tingkat kecamatan, dari pihak Bappeda biasanya juga diundang dalam pelaksanaan Musrenbang ini dan juga pihak pihak terkait untuk memberikan penilaian mengenai usulan usulan dari desa tersebut. selanjutnya berita acara hasil Musrenbang tingkat kecamatan ini akan ditindak lanjuti dengan mengadakan rapat bersama Forum Perangkat Daerah selama 3 hari berturut turut. Barulah kemudian kami melaksanakan Musrenbang tingkat kabupaten yang melibatkan pihak pihak terkait untuk memberikan masukan terkait program yang diusung dalam dokumen RPJMD. Hasil dari Musrenbang inilah yang kemudian kami jadikan dasar penyempurnaan dokumen Rancangan akhir RPJMD 2018-2023”



*Dokumentasi pelaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan*

<sup>50</sup> Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kapala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Dokumentasi pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan*



*Dokumentasi Rapat Forum Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil Musrenbang tingkat kecamatan*

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas maka dapat dicermati bahwa pelaksanaan musrenbang ini hampir sama dengan pelaksanaan forum konsultasi publik, dimana melibatkan pihak-pihak terkait agar dapat memberikan masukan mengenai program-program yang di usung dalam RPJMD. Musrenbang dilaksanakan 75 hari setelah KDH dan WKDH dilantik. Sebelumnya perangkat daerah juga melaksanakan forum konsultasi lintas untuk menjaring aspirasi masyarakat yang nanti nya akan disampaikan dalam musrenbang”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



*Dokumentasi Rapat Persiapan Musrenbang tingkat Kabupaten*



Rapat Persiapan MUSRENBANG tahun 2018 kabupaten Empat Lawang

*Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten*

## 5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir ini merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD yang berdasarkan kesepakatan hasil dari Musrenbang yang telah dilaksanakan, berikut hasil wawancara mengenai proses perumusan rancangan akhir RPJMD 2018-2023 :

“Proses perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan dokumen rancangan terhadap hasil musrenbang RPJMD dari hasil berita acara yang dihasilkan dalam musrenbang itu dijadikan dasar untuk penyempurnaan dokumen menjadi rancangan akhir. Setelah disempurnakan maka dokumen rancangan akhir disampaikan kepada sekda melalui perangkat daerah yang membidangi hukum (bagian hukum sekretariat daerah). Penyampaian ini paling lambat 5 hari

setelah musrenbang RPJMD dilaksanakan. Kemudian Sekda menugaskan perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pemantapan tentang Ranperda RPJMD. Setelah bagian hukum melakukan pemantapan Ranperda RPJMD. Maka sekda melalui bagian hukum tersebut menyampaikan hasil pemantapan Ranperda untuk mendapatkan persetujuan pada setiap lembar Perda tersebut. Kemudian Bappeda menyampaikan Ranperda kepada Kepala Daerah untuk disampaikan kepada DPRD agar mendapatkan persetujuan dalam bentuk nota kesepakatan yang di paripurnakan.”<sup>51</sup>

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Bapak Yulius Sugiantara,

S.E.,M.SI selaku Kepala Bappeda mengenai perumusan rancangan akhir RPJMD :

“Setelah tahapan pelaksanaan Musrenbang, hasil berita acara kesepakatan dari Musrenbang ini menjadi bahan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD. Kemudian kami menyampaikan rancangan akhir ini yang sudah dimuat dalam Ranperda kepada Sekda, kami sampaikan 5 hari setelah pelaksanaan Musrenbang. Kemudian dari Sekda akan menyampaikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan akhir ini kepada saya selaku kepala Bappeda Empat Lawang untuk menandatangani persetujuan di setiap halaman Perda tentang RPJMD tersebut. Setelah saya tanda tangani maka akan saya paparkan kepada KDH. Barulah kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama dengan KDH Empat Lawang, penyampaian rancangan Perda ini paling lambat 90 hari setelah KDH dan WKDH dilantik”.<sup>52</sup>

Begitu pula yang dikatakan ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid

Pengendalian dan Pelaporan :

“Dalam perumusan rancangan akhir RPJMD, yang kami jadikan dasar penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD ialah hasil Musrenbang yang sudah disepkati sebelumnya. Kemudian rancangan akhir RPJMD ini dimuat dalam Ranperda yang akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Empat Lawang setelah 5 hari pelaksanaan Musrenbang, dari Sekda kemudian akan ada pemantapan rancangan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk ditanda tangani setiap lembar halaman Ranperda tentang RPJMD tersebut. Setelah di buhuhi tanda tangan dari kepala Bappeda selanjutnya akan disampaikan kepada KDH, kemudian

<sup>51</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

<sup>52</sup> Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

KDH akan menyampaikan kepada DPRD Empat Lawang untuk mendapatkan persetujuan bersama.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa hasil berita acara yang dihasilkan pada saat pelaksanaan musrenbang dijadikan sebagai dasar penyempurnaan dokumen menjadi rancangan akhir. 5 hari setelah pelaksanaan musrenbang maka rancangan akhir akan disampaikan kepada Sekda melalui perangkat daerah yang membidangi hukum. Setelah itu akan dilakukan penetapan Ranperda RPJMD setelah ditetapkan Ranperda akan disampaikan oleh Bappeda kepada kepala daerah dan disampaikan lagi kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

## 6. Penetapan RPJMD

Penetapan RPJMD merupakan tahapan akhir dalam penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017, berikut hasil wawancara mengenai penetapan RPJMD 2018-2023 kabupaten Empat Lawang :

‘Dari hasil nota kesepakatan ini maka dibawak ke provinsi untuk mendapatkan Evaluasi terhadap rancangan Perda tersebut. dari hasil SK gubernur tentang evaluasi rancangan perda di perbaiki paling lambat 5 bulan setelah KDH dan WKDH dilantik dokumen RPJMD tersebut harus sudah ditetapkan dengan catatan sudah diperbaiki berdasarkan SK evaluasi gubernur yang telah dilaksanakan.’<sup>54</sup>

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Bapak Yulius Sugiantara, S.E.,M.SI selaku Kepala Bappeda mengenai penetapan RPJMD :

“Setelah dibahas oleh DPRD dan disetujui bersama KDH, maka KDH akan mengajukan Ranperda tentang RPJMD kepada Gubernur Sumatra Selatan untuk mendapat evaluasi, evaluasi ini dilaksanakan 5 bulan setelah bupati dilantik. Kemudian KDH akan menetapkan Ranperda tentang

<sup>53</sup> Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>54</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

RPJMD menjadi Perda kabupaten tentang RPJMD. Penetapan ini dilakukan paling lambat 6 bulan setelah KDH dan WKDH terpilih dilantik.”<sup>55</sup>

Begitu pula yang dikatakan ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid

Pengendalian dan Pelaporan :

“Setelah emndapat persetujuan bersama antara KDH dan DPRD maka Kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang RPJMD ini kepada Gubernur Sumatra Selatan untuk mendapatkan SK evaluasi, setelah mendapatkan evaluasi maka Ranperda harus diperbaiki paling lambat 5 bulan setelah pelantikan KDH terpilih, setelah itu barulah akan ditetapkan Ranperda tentang RPJMD menjadi Perda kabupaten tentang RPJMD.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat dicermati bahwa Ranperda akan ditetapkan menjadi Perda RPJMD setelah di evaluasi dan dilakukan perbaikan paling lambat 5 bulan setelah KDH dan WKDH dilantik dan dokumen RPJMD akan ditetapkan setelah diperbaiki berdasarkan SK Evaluasi dari gubernur.

## **B. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Kinerja Bappeda dalam Penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang**

Setiap organisasi mempunyai tujuan, salah satu sasaran dari organisasi untuk mencapai tujuan adalah kinerja para anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kedudukan dan peranan masing-masing dalam organisasi tersebut. Organisasi instansi pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan

<sup>55</sup> Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>56</sup> Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan stimulasi yang berpengaruh terhadap banyak orang. Berhasil tidaknya tujuan, sasaran dan cita-cita dalam suatu organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 Bappeda Empat Lawang terdapat faktor yang menghambat dan mendukung kinerjanya. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yulius Sugiantara, SE, M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang mengenai kualitas pelayanan, beliau mengatakan :

“Faktor yang menghambat kami dalam penyusunan RPJMD 2018-2023: Kurangnya SDM perencana yang berkualitas. SDM kami belum ideal untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka dari itu saya mengutamakan kerjanya “kerja bersama” semua membantu bidang PPEP & Litbang, Kurang efektifnya penggunaan teknologi SIMREDA, OPD yang berada di empat lawang terutama yang berada di kecamatan ada beberapa yang belum mempunyai infrastruktur TIK , ditambah lagi kondisi sinyal mereka yang tidak bagus karena SIMREDA sudah online. Namun berjalan seiringnya waktu penggunaan aplikasi SIPD skrg ini sudah cukup baik, sering terjadinya mutasi sektor perencanaan yang ada di OPD sehingga harus ada penyesuaian dengan personil yang baru yang mengakibatkan terkadang data OPD itu tidak dapat tersinkronisasi dengan baik, sarana dan prasaran kami yang belum memadai saat itu, kualitas lingkungan fisik yang meliputi penataan ruangan dan kebersihan juga berpengaruh terhadap kinerja kami, dimana kondisi ruangan terutama bagian pegawai pegawai tidak tertata rapi dan terlihat tidak terlalu bersih. Sebenarnya kami tidak kekurangan petugas kebersihan namun tanggung jawabnya saja yang kurang.

Kemudian faktor yang dapat mendukung:

Dalam pengelolaan SDM saya memberikan reward kepada masing-masing pegawai yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Semisal nya dengan mengajak tim yang sudah mencapai target makan bersama. Pegawai yang disiplin dalam pekerjaan (dalam hal waktu jam kerja), saya selalu memberikan motivasi dan inovasi agar kerja kami tetap bagus meskipun terbatas SDM, kerjasama yang baik melalui tim yang telah dibentuk, merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung kinerja, Selanjutnya kami juga didukung dalam hal kelengkapan administrasi susunan, tujuan dan prosedur yang kami buat sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam penyusunan RPJMD. Jadi

setiap akhir tahun Bappeda akan mengedarkan surat ke pihak-pihak dinas sampai kepada tingkat kecamatan, kemudian setiap dari pihak yang menerima surat edaran tersebut akan mengajukan Rencana Pembangunan 5 tahun kedepan, mereka mengajukan program sebanyak mungkin kemudian baru diajukan di tingkat Kabupaten, dan diadakan Banggar tingkat DPR apakah anggaran tersebut cukup atau tidak, setiap dinas akan memaparkan program mereka kepada buapti dan DPR, kemudian akan disaring mana kegiatan yang paling penting yang harus dilaksanakan.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa faktor yang menghambat dalam penyusunan RPJMD yaitu

1. Kurang SDM perencana yang berkualitas
2. sarana dan prasarana yang kurang memadai
3. kurangnya koordinasi antar instansi
4. tidak maksimalnya penggunaan teknologi
5. dan kondisi lingkungan fisik yang ada di Bappeda seperti penataan ruangan.

Sedangkan faktor yang mendukung pada saat penyusunan RPJMD yaitu

1. Koordinasi antar unit atau kerjasama tim yang bagus di Bappeda
2. motivasi, inovasi, dan reward dari atasan ketika mencapai kinerja yang baik
3. kelengkapan administrasi pada bappeda sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD, dimana tujuan, susunan dan prosedur sudah dibuat dan dilaksanakan sebaik mungkin untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD.

<sup>57</sup>Wawancara bersama Bapak Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

Hal senada juga dikatakan kepada ibu YenieNur Widiastuti., S.E,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, mengatakan :

”Faktor yang menghambat kami dalam penyusunan RPJMD2018-2023 : Terbatasnya SDM , bisa dilihat dengan kosongnya dua jabatan kasubid dan jumlah staf yang tidak ekuivalen dengan jumlah kasubid yang ada, sering terjadi mutasi pada OPD sehingga Kurangnya koordinasi antar OPD dalam rangka sinkronisasi pekerjaan dan kurangnya pemahaman OPD terhadap fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Fasilitas sarana di bappeda yang tidak memadai saat itu, Penggunaan aplikasi E-Planning yang tidak dapat optimal karena keterbatasan jaringan pada saat musrenbang, faktor lain nya salah satunya penataan ruangan yang kurang rapi juga berpengaruh terhadap kinerja kami. Mungkin karena kantor kami memang tidak terlalu luas. Kemudian faktor yang mendukung kami dalam penyusunan RPJMD kerja sama tim kami yang bagus yang didukung oleh motivasi, inovasi dan sekali sekali ada reward dari atasan jika kinerja kami bagus, disiplin waktu jam kerja para pegawai, kemudian kelengkapan administrasi juga kami laksanakan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD, selain itu bappeda juga didukung oleh anggaran dana yang ada untuk menyusun rencana pembangunan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa faktor yang menghambat dalam penyusunan RPJMD yaitu

1. terbatasnya SDM
2. kurangnya koordinasi antar instansi (pada OPD) ketika ada mutasi jabatan
3. fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai
4. penggunaan aplikasi E-Planning yang tidak maksimal.
5. Kurang rapinya penataan ruangan

Sedangkan faktor yang mendukung dalam penyusunan RPJMD yaitu

1. kerja sama tim yang baik
2. motivasi, inovasi, reward dari atasan
3. kelengkapan administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

4. Disiplin waktu jam kerja para pegawai
5. Anggaran dana yang sudah disiapkan

Begitu pula hal yang dikatakan ibu Wika Patriana Butsi, S.E. selaku

Kasubid Pengendalian dan Pelaporan beliau mengatakan :

“Kalo bagi saya faktor yang mempengaruhi/ yang menghambat kinerja kami dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 yaitu :

Terbatasnya SDM yang berkualitas dan kuantitas SDM ini tidak terlalu banyak, kami di bappeda ini rata-rata tidak ada staf. Jadi hanya ada Subid dan Kabid dan biasanya dalam satu bidang hanya ada satu staf. Itupun saat penyusunan RPJMD 2018 mereka belum masuk, terjadinya mutasi pada OPD sehingga terkadang program yang sudah dibuat belum terlaksana tapi sudah dibuat program baru tidak mempunyai fasilitas yang cukup, penggunaan aplikasi SIPD yang tidak dapat maksimal. Sedangkan Faktor yang dapat mendukung : Anggaran dana yang ada, kerja sama tim kami yang kompak sehingga pekerjaan dapat terselesaikan meskipun kekurangan Bappeda kekurangan SDM, kemudian kami dalam bekerja selalu berusaha agar selalu disiplin, supaya hasil yang kami capai juga dapat maksimal, kami juga dijanjikan akan mendapatkan reward dari kepala bappeda jika mencapai kinerja dengan baik jadi ini bisa member kami semangat dalam bekerja, prosedur dan susunan administrasi kami juga sudah sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Jadi dalam penyusunan RPJMD misalnya, kami melaksanakan musrenbang untuk menerima usulan mengenai program yang akan disusun 5 tahun kedepan, kemudian ada LKjIP sebagai bentuk laporan kinerja kami, kemudian ada rapat Banggar untuk menyesuaikan anggaran dengan program yang di usulkan oleh pemangku kepentingan dll.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam penyusunan RPJMD yaitu

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pada penyusunan RPJMD 2018 2023
2. sarana dan prasarana kantor yang tidak cukup

<sup>58</sup>Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. kurangnya koordinasi antar instansi (pada OPD)
4. dan penggunaan teknologi yang tidak dapat maksimal

Sedangkan faktor yang mendukungnya yaitu

1. kerja sama tim yang baik, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu
2. Motivasi, inovasi dan reward dari kepala bappeda sebagai penyemangat kerja
3. Di dukung oleh anggaran dana yang ada
4. Administrasi disusun sesuai dengan apa yang dibutuhkan bappeda
5. Disiplin jam kerja para pegawai bappeda agar dapat mencapai hasil yang maksimal

Selain itu wawancara selanjutnya juga dilakukan kepada ibu Irin Pradella,

Staf Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi  
SAP selaku staf analisis kepegawaian mengatakan :

“Untuk faktor yang menghambat kami dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 itu ada beberapa hal diantaranya :

Kurangnya SDM perencana yang berkualitas Kompetensi pendidikannya 40% belum memenuhi kompetensi, Penggunaan teknologi pada saat penyusunan RPJMD kabupaten Empat Lawang pada saat itu belum dapat teroptimalkan, Kemudian terjadinya mutasi dan pergantian pemimpin sehingga ada program baru hal ini mempengaruhi perencanaan yang sudah dibuat, fasilitas di bappeda yang kurang mendukung, kondisi lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja kami, kami belum punya ruangan yg cukup bagi masing-masing bidang. Sedangkan faktor yang mendukung kami dalam penyusunan RPJMD :tim yang solid, disiplin jam kerja,Anggaran nya ada dan ketika kami melakukan kinerja yang baik itu ada Apresiasi atau reward dari kepala bappeda jadi bisa menambah semangat kerja kami , dalam melengkapi administrasi bappeda empat lawang ini sudah memenuhi susunan dan prosedur dengan baik dan sesuai yang dibutuhkan untuk penyusunan RPJMD, bisa dilihat dari tahap awal penyusunan sampai pada tahap akhir”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa faktor yang menghambat dalam penyusunan RPJMD yaitu :

1. kurangnya SDM perencana yang berkualitas
2. penggunaan teknologi yang tidak dapat maksimal
3. kurangnya koordinasi antar instansi (pada OPD),
4. fasilitas sarana dan prasarana yang tidak mendukung.
5. Ruang kerja yang belum memadai

Sedangkan faktor yang mendukung dalam penyusunan RPJMD yaitu :

1. anggaran dana yang ada
2. Displin jam kerja
3. apresiasi dari atasan jika mencapai tujuan kinerja dengan baik.
4. kerja sama tim yang baik
5. dan kelengkapan administrasi.

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada ibuIrma Dewi Anggarini.

S. Si.MMG.M.URP selaku sekretaris Bappeda Empat lawang mengatakan :

“Faktor-faktor yang menjadi penghambat kami saat penyusunan RPJMD Kuantitas dan Kualitas SDM nya kurang, dalam penyusunan dokumen sangat membutuhkan pengetahuan khusus jadi keterbatasan ini menjadi penghambat.kuantitas SDM ini tidak terlalu banyak, kami di bappeda ini rata-rata tidak ada staf.Jadi hanya ada Subid dan Kabid dan biasaya dalam satu bidang hanya ada satu staf. Itupun saat penyusunan RPJMD 2018 mereka belum masuk, kemudian SIPD belum dapat berjalan secara maksimal pada saat itu, tapi sekarang penggunaan SIPD sudah cukup baik diakui oleh kemendagri karna kami aktif dalam penggunaannya, kerja sama instansi sudah bagus hanya saja terkadang ada mutasi dari bidang perencanaan pada OPD, sehingga harus menyesuaikan dengan peronil baru dan itu menyebabkan data OPD tidak tersingkronisasi dengan baik, selain itu sarana dan prasarana juga kurang memadai pada saat itu. Sedangkan faktor yang mendukung kami yaitu teamwork yang cukup solid dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

pelaksanaan pekerjaan, kemudian kami juga di tekankan untuk selalu disiplin dalam bekerja karna kami sadar kami kekurangan SDM ,Adanya bantuan-bantuan dana dari provinsi atau pusat yang mendukung pembangunan Kabupaten Empat lawang, motivasi, inovasi dan reward yang diberikan kepala bappeda dalam menghargai kinerja kamiDan kelengkapan administrasi yang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD, prosedur administrasi yang lengkap ini dapat dilihat dari awal kami menyusun RPJMD sampai ke tahap penetapan RPJMD.”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa faktor yang menghambat dalam penyusunan RPJMD yaitu :

1. kuantitas dan kualitas SDM
2. penggunaan teknologi yang tidak dapat maksimal
3. kurangnya koordinasi antar instansi (pada OPD)
4. sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Sedangkan faktor yang mendukung dalam penyusunan RPJMD yaitu,

1. adanya anggaran dana atau bantuan dana dari provinsi
2. kerja sama tim yang baik
3. Disiplin kerja pegawai yang maksimal
4. motivasi, inovasi dan reward dari kepala bappeda
5. dan kelengkapan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan

bappeda dalam penyusunan RPJMD

### **C. Kinerja Bappeda dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan.**

Kinerja menjadi bagian dari kegiatan administrasi, yaitu berupa kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengeloannya sering disebut

---

<sup>59</sup>Wawancara bersama ibu Irma Dewi Angraini, S.Si.MMG.M.URP selaku Sekretaris Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

manajemen. Melakukan kinerja yang baik merupakan salah satu langkah agar mudah tercapainya tujuan dalam organisasi. Kinerja Bappeda Kabupaten Empat Lawang dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara.

### 1. Responsivitas

Responsivitas diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakatnya., menyusun agenda dan priotas pelayanan dan melaksanakan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Yenie Nur Widiastuti, SE,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang mengatakan bahwa :

“Bappeda empat lawang telah berusaha secara maksimal dalam meningkatkan reponsivitas terhadap masyarakat bappeda empat lawang. Jadi dalam penyusunan RPJMD kita sudah menyusun beberapa prioitas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarkat prioritas tersebut yaitu Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan Peningkatan Keamanan dan Perlindungan masyarakat”.<sup>60</sup>

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada bapak Bapak Yulius Sugiantara, SE, M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang , beliau mengatakan

“Upaya dalam mengedepankan kepentingan rakyat dalam penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan menjalankan seluruh tahapan yang diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Dimana kami harus melakukan konsultasi publik dalam rangka memperoleh masukan dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, melakukan desk/pembahasan mendalam dengan perangkat daerah dalam membahas permasalahan dan isu strategis daerah, dimana OPD teknis tentunya mempunyai hasil analisis dari monev yang dilakukan secara regular. Kemudian kami melaksanakan Musrenbang RPJMD guna menjanging

<sup>60</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

kembali semua masukan-masukan dari seluruh stakeholder terhadap rancangan RPJMD yang telah dirumuskan”.<sup>61</sup>

Hal senada juga diucapkan ibu Irin Pradella, S.AP selaku staf analisis kepegawaian mengatakan :

“Kami menyusun prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMD dengan menerima masukan-masukan dari masyarakat melalui musrenbang”.<sup>62</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Wika Patriana Butsi, S.E.

selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan beliau mengatakan :

“Dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan musrenbang, sehingga kami dapat menyusun program apa saja yang harus di prioritaskan berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat tersebut dan kami melihat bahwasannya potensi ekonomi di empat lawang sangatlah bagus maka dari itu peningkatan produktivitas pertanian juga termasuk salah satu prioritas pembangunan empat lawang”.<sup>63</sup>

Hal senada juga dikatakan ibu Irma Dewi Anggarini, S.Si.MMG.M.URP

selaku sekretaris Bappeda Empat lawang mengatakan :

“Dalam penyusunan RPJMD kami sudah menyelesaikan tahap demi tahap seperti yang sudah di jelaskan dalam Permendagri no 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. jadi dalam tahapan tersebut ada proses Musrenbang yang melibatkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan dll. Agar mereka dapat memberikan masukan terhadap pembangunan di Kabupaten Empat Lawang ini”.<sup>64</sup>

<sup>61</sup>Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>62</sup>Wawancara bersama ibu Irin Pradella, S.AP selaku staf analisis kepegawaian Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>63</sup>Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>64</sup>Wawancara bersama ibu Irma Dewi Anggraini, S.Si.MMG.M.URP selaku Sekretaris Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan musrenbang Bappeda Empat Lawang dapat memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun agenda prioritas berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat empat lawang.

## 2. Produktivitas

Produktivitas dalam organisasi tidak hanya mengukur ditingkat efesiensi, tetapi juga dalam hal efektivitas pelayanan. Sebagai indikator pencapaian kinerja dapat dilihat dari terlaksananya tanggungjawab yang diberikan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Bapak Yulius Sugiantara, SE, M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang mengenai produktivitas, beliau mengatakan :

“Menyusun sebuah dokumen perencanaan seperti RPJMD ini bukanlah hal yang mudah untuk instansi yang terbatas SDM seperti kami, tapi kami bekerja tidak sendiri. kami bekerjasama juga dengan pihak instansi lain, proses penyusunan RPJMD 2018-2023 kabupaten Empat lawang sudah melaksanakan 6 tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Hal ini tentu disebabkan kerjasama yang baik antara pegawai yang ada dibappeda itu sendiri maupun dengan instansi-instansi lainnya”.<sup>65</sup>

Hal senada juga dikatakan ibu Irma Dewi Anggarini. S.Si.MMG.M.URP selaku sekretaris Bappeda Empat lawang bahwa :

“Produktivitas kinerja bappeda empat lawang dalam penyusunan RPJMD sudah berusaha maksimal agar dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu, jadi melalui kerjasama tim kami dapat menyelesaikan tahap demi tahap penyusunan RPJMD sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, seperti kapan kami harus

---

<sup>65</sup>Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

menyusun tim, kapan kami harus menyiapkan rancangan teknokratik dll”.<sup>66</sup>

Hal senada juga dikatakan ibu Wika Patriana Butsi,SE selaku Kasubid

Pengendalian dan Pelaporan, beliau mengatakan :

“Pada saat penyusunan RPJMD 2018-2023 kami bekerja sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan, meskipun kekurangan SDM perencana, pekerjaan kami tetap selesai tepat waktu melalui kerja sama yang baik. Sehingga proses penyusunan dapat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan walaupun ada sedikit kendala-kendala pada saat itu, seperti terbatasnya alat elektronik dibappeda, ruangan kerja yang terbatas namun hal ini dapat diatasi”.<sup>67</sup>

Begitu pula yang dikatakan ibu Irin Pradella, S.AP selaku staf analisis

kepegawaian mengatakan :

“Kami bekerja secara maksimal dalam penyusunan RPJMD 2018-2023, kami tau SDM kami terbatas, maka dari itu kami para pegawai berusaha kompak dalam penyelesaian pekerjaan dan membantu bidang PPEP ,agar proses penyusunan RPJMD ini dapat sesuai yang diamanatkan Permendagri nomor 86 tahun 2017”.<sup>68</sup>

Kemudian ibu Yenie Nur Widiastuti, SE,ME selaku Kabid perencanaan,

pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang juga mengatakan bahwa :

“Sebelum penyusunan RPJMD agar produktivitas kami baik, kami harus mengenali dimana kelemahan bappeda kami. Kelemahan kami paling utama terdapat pada SDM perencana, oleh sebab itu dalam proses penyusunan dan sebelum penyusunan pun seluruh bidangakan bekerja sama untuk membantu bidang PPEP agar semua proses penyusunan RPJMD dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan”.<sup>69</sup>

<sup>66</sup>Wawancara bersama ibu Irma Dewi Anggraini, S.Si.MMG.M.URP selaku Sekretaris Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>67</sup>Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>68</sup>Wawancara bersama ibu Irin Pradella, S.AP selaku Staf analisis kepegawaian Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>69</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai instansi yang bertugas merencanakan pembangunan daerah ,produktivitas kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Empat lawang sudah baik. Hal ini bisa dilihat bahwa Bappeda dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan melaksanakan tahapan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, melalui kerjasama tim yang baik, meskipun kekurangan SDM perencana. Berikut ini table yang menunjukkan jumlah pegawai di Bappeda Empat Lawang pada saat penyusunan RPJMD 2018-2023

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Esselon.<sup>70</sup>

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	4 Orang	Pembina TK I	1 Orang	II – b	1
		Pembina	1 Orang	III-a	1
		Penata	1 Orang	III-b	1
		Penata Muda TK I	1 Orang	IV-a	1
S1	18 Orang	Pembina TK I	1 Orang	III-b	1
		Penata	12 Orang	III-b	3
				IV-a	10
		Penata Muda TK I	1 Orang	IV-a	1
		Penata Muda	4 Orang	V-a	

<sup>70</sup>Kantor Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

D3	3 Orang	Pengatur TK I	2 Orang	-	-
SMA	1 Orang	Pengatur	1 Orang	-	-
Jumlah	25 Orang		25 Orang		19

“Berdasarkan table diatas pada saat penyusunan RPJMD SDM aparatur dibappeda empat lawang berjumlah 25 Orang. Pada saat itu pelaksanaan mutasi suntuik golongan IV dan III yang menduduki jabatan di Bappeda tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya dan saat itu kekurangan pegawai PNS yang bisa menduduki jabatan struktural. Karena pada saat pelaksanaan penerimaan PNS setiap tahunnya instansi Bappeda paling banyak hanya menerima 1 orang untuk menerima pegawai itupun hanya sebagai staf belum bisa menduduki jabatan sebagai Kabid hal ini juga disebabkan Karena kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten yang baru berkembang.”<sup>71</sup>

### 3. Kualitas Layanan

Dalam suatu organisasi publik kualitas pelayanan merupakan hal yang penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Kepuasan dari masyarakat bisa menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik. Kualitas pelayanan sangat bersifat esensial dalam organisasi publik yang harus diwujudkan oleh birokrat pemerintahan yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yulius Sugiantara, SE, M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang mengenai kualitas pelayanan, beliau mengatakan :

<sup>71</sup>Wawancara bersama ibu Irin Pradella S.AP selaku Staf analisis kepegawaian Bappeda Empat Lawang, wawancara 11 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Mengenai kualitas pelayanan dalam penyusunan RPJMD di Bappeda sudah dilaksanakan sebaik mungkin, kami melaksanakan Musrenbang mengundang seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan supaya mereka dapat memberikan masukan kepada kami mengenai program yang sudah kami prioritaskan yang sesuai dengan kondisi mereka, kemudian dari segi sarana dan prasarana di Bappeda empat lawang pada saat itu terbatas seperti ruangan kerja, laptop dll. Namun pada saat ini alhamdulillah sudah hampir memadai”.<sup>72</sup>

Hal Senada juga diucapkan ibu Yenie Nur Widiastuti, SE,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, mengatakan :

“Mengenai kualitas pelayanan bappeda dalam penyusunan RPJMD, kami sudah melibatkan mereka dalam kegiatan musrenbang yang bisa diikuti melalui Aplikasi E-Planning, namun penggunaan aplikasi ini tidak dapat digunakan secara maksimal salah satu penyebabnya terkendala jaringan kemudian masyarakat yang tidak terlalu faham bagaimana cara penggunaan aplikasi E-Planning ini dan sarana penunjang yang ada dibappeda sudah dilengkapi seiring berjalannya waktu”.<sup>73</sup>

Begitu pula yang dikatakan ibu Wika Patriana Butsi,SE selaku Kasubid

Pengendalian dan Pelaporan :

“Kami sudah menyiapkan aplikasi E-Planning agar masyarakat empat lawang dapat memberikan masukan pada musrenbang baik itu tingkat desa maupun tingkat kecamatan.Namun keterbatasan pengetahuan pada masyarakat aplikasi ini tidak dapat digunakan secara maksimal, dalam penyusunan kemarin sarana penunjang pelayanan kami kurang, tapi sekarang dari segi internal sudah 80% terpenuhi”.<sup>74</sup>

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada ibu Irin Pradella, S.AP selaku staf analisis kepegawaian mengatakan :

“Alhamdulillah dari tahun ke tahun fasilitas penunjang pelayanan di Bappeda Empat lawang sudah bisa dikatakan lengkap. Bentuk pelayanan kami dalam penyusunan RPJMD kepada masyarakat, kami libatkan dalam

<sup>72</sup> Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>73</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

<sup>74</sup>Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

musrenbang dan kami sediakan aplikasi E-Planning, agar mereka lebih mudah memberikan masukan dan mengetahui perkembangan pembangunan Empat Lawang , penggunaan aplikasi ini sendiri pada akhirnya tidak dapat digunakan secara optimal. Bisa jadi karena mereka tidak mengerti, jaringan yang tidak mendukung, atau tingkat keperdulianya terhadap pembangunan rendah”.<sup>75</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Irma Dewi Anggarini.

S.Si.MMG.M.URP selaku sekretaris Bappeda Empat lawang mengatakan :

“Untuk meningkatkan pelayanan di Bappeda Empat Lawang dalam penyusunan RPJMD, kami sudah melaksanakan Musrenbang dengan mengundang seluruh pihak pemangku kepentingan untuk memberikan usulan mengenai program yang akan di prioritaskan dalam RPJMD, selain itu juga telah digunakannya aplikasi SIMREDA ( Sistem Informasi Rencana Daerah) atau E-Planning. Aplikasi ini dapat diakses secara online sehingga masyarakat umum pun dapat memberikan masukan mengenai pembangunan di Empat Lawang, begitupun dengan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam penyusunan RPJMD, saat ini dibappeda bisa dikatakan 80% terpenuhi.Penilaian saya terhadap penggunaan aplikasi E-Planning ini tidak terlaksana sesuai dengan harapan kami, masyarakat tidak terlalu aktif dalam memberikan masukan.Penyebabnya mungkin karna terbatasnya pengetahuan mereka mengenai teknologi, jaringan, sibuk bekerja sendiri-sendiri dll”.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bappeda dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 sudah melibatkan seluruh stakeholder berkepentingan untuk mengikuti musrenbang kemudian melalui aplikasi E-Planning dapat membuka peluang bagi masyarakat umum untuk mengikuti musrenbang tingkat desa, kecamatan agar dapat memberikan masukan mengenai program yang akan diprioritaskan, karne hanya masyarakat setempatlah yang faham apa yang saat itu benar benar dibutuhkan. Namun, pada saat itu penggunaan aplikasi ini tidak dapat berjalan secara optimal

<sup>75</sup>Wawancara bersama ibu Irin Pradella, S.AP selaku Staf analisis kepegawaian Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>76</sup>Wawancara bersama ibu Irma Dewi Anggraini, S.Si.MMG.M.URP selaku Sekretaris Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

dikarenakan masyarakat empat lawang terbatas pengetahuan akan teknologi, kemudian jaringan yang tidak ada, dan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan Empat Lawang, dan dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 sarana prasarananya pada saat itu kurang memadai namun seiring berjalannya waktu sudah 80% terpenuhi.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas ini mengukur apakah pelaksanaan organisasi ini telah dilakukan sesuai prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplit maupun implisit. Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada bapak Yulius Sugiantara, SE, M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang mengenai Responsibilitas dalam penyusunan RPJMD, beliau mengatakan :

“Administrasi dalam penyusunan RPJMD, kami memang kekurangan pegawai oleh sebab itu untuk melakukan kerja besar langkah pertama kami akan membentuk tim setelah melihat jadwal penyusunan, saya selaku kepala memanejemenkan dalam rangka penyusunan RPJMD tersebut melakukan motivasi, melakukan arahan untuk melaksanakan tupoksinya, kemudian melakukan rapat staf dan rapat evaluasi dalam rangka mendengar apa saja yang sudah dilakukan oleh staf. Jadi masing-masing staf anggota harus menyampaikan laporan kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan”.<sup>77</sup>

Hal senada juga diucapkan ibu Irin Pradella, S.AP selaku staf analisis kepegawaian mengatakan :

“Dalam penyusunan RPJMD Kami sudah melakukan tanggungjawab sesuai dengan Jobdesk masing-masing jika diukur kinerja responsibilitas

<sup>77</sup>Wawancara bersama Bapak Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

bappeda menurut saya sudah kompak karna sudah terarah dan setiap hari ada laporan”.<sup>78</sup>

Begitu pula hal yang dikatakan ibu Irma Dewi Anggarini.

S.Si.MMG.M.URP selaku sekretaris Bappeda Empat lawang mengatakan :

“Untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan SDM sangat berpengaruh, karna keterbatasan kami berusaha bekerjasama untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Sehingga yang kemampuannya masih kurang dapat ditutupi dan pekerjaan masing-masing bidang dapat terselesaikan”.<sup>79</sup>

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada ibu Yenie Nur Widiastuti, SE,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, mengatakan

“Responsibilitas Bappeda empat lawang dalam penyusunan RPJMD sudah cukup baik kami telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, meskipun kompetensi yang dimiliki kawan-kawan di bappeda empat lawang ini masih standar,kami tetap bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada, terkadang juga satu orang harus menyelesaikan pekerjaan yang double”.<sup>80</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Wika Patriana Butsi,SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan :

“Ketika Penyusunan RPJMD, dimulai dari tahap persiapan penyusunan kami sudah dibagi tugas masing-masing dalam bentuk tim. Kami bekerja sama agar semua kegiatan dapat terlaksana secara maksimal, di bappeda ini selalu melaksanakan rapat evaluasi jadi melalui rapat ini dapat diketahui sudah sejauh mana kinerja kami”.<sup>81</sup>

<sup>78</sup>Wawancara bersama ibu Irin Pradella, S.AP selaku Staf analisis kepegawaian Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>79</sup>Wawancara bersama ibu Irma Dewi Anggraini, S.Si.MMG.M.URP selaku Sekretaris Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>80</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE.,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

<sup>81</sup>Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa bappeda empat lawang sudah melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip administrasi yang benar. Masing-masing bidang sudah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan didukung dengan diadakannya rapat evaluasi maka capaian kinerja bappeda empat lawang akan terlihat bagian yang sudah terselesaikan dan yang belum terselesaikan.

### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Bappeda Empat Lawang secara moral dan factual juga ikut bertanggungjawab atas kelancaran jalannya roda pemerintahan di daerah demi pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengatur dan mengurus pemerintahan harus benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat, serta tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu salah satu ukuran kinerja Bappeda Empat Lawang adalah mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan kepada publik melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yulius Sugiantara, SE, M.SI selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suna Jambi

Kepala Bappeda Empat Lawang mengenai Akuntabilitas pelayanan, beliau mengatakan :

“Setiap tahun ada yang dinamakan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah).LKjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Bappeda Empat Lawang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Laporan pertanggung jawaban kami di upload di web resmi Bappeda Empat Lawang sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

LKjIP juga merupakan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat mengenai lembaga pemerintahan selama satu tahun anggaran.Yang disampaikan kepada bupati.Jadi melalui LKjIP ini bisa dilihat keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah kami capai, kami juga telah menyusun LKjIP secara jujur, objektif, akurat dan transparan”.<sup>82</sup>

Hal senada juga dikatakan ibu Irma Dewi Anggarini. S.Si.MMG.M.URP

selaku sekretaris Bappeda Empat lawang mengatakan

“Mengenai akuntabilitas Bappeda Empat Lawang akan disusun LKjIP setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang diukur melalui Perjanjian Kinerja (PK), PK ini merupakan pernyataan atau komitmen atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dari masing masing bidang dalam jangka waktu setahun dengan pertimbangan Sumber daya yang dikelola. LKjIP bappeda kami susun berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang kami capai pertahun.dan masyarakat juga dapat melihat LKjIP ini di web resmi Bappeda Empat Lawang, sehingga tidak masyarakat tau sudah sejauh mana kami bekinerja dalam penyusunan RPJMD 2018-2023”.<sup>83</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada ibu Wika Patriana Butsi,SE

selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan :

“Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), jadi di dalam laporan tersebut dijelaskan mengenai Perjanjian Kinerja dari masing-

<sup>82</sup>Wawancara bersama Bapak Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>83</sup>Wawancara bersama ibu Irma Dewi Anggraini, S.Si.MMG.M.URP selaku Sekretaris Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

masing-masing bidang, target yang harus kami capai dalam jangka satu tahun, realisasi anggaran”.<sup>84</sup>

Begitu pula hal yang dikatakan ibu Yenie Nur Widiastuti, SE,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang :

“Berdasarkan Perpres No 29 tahun 2014, maka Setiap tahunnya ada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam dokumen laporan ini terdapat target kinerja yang harus kami capai melalui PK yang telah dibuat sebelumnya, jadi LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Bappeda mengenai keberhasilan dan kekurangan kinerja yang kami capai, kemudian dalam LKjIP ini juga memuat realisasi anggaran atas program yang dibuat”.<sup>85</sup>

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada ibu Irin Pradella, S.AP selaku staf analisis kepegawaian mengatakan :

“Dalam susunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dilihat sejauh mana kinerja Bappeda bertanggungjawab atas kegiatan yang sudah direncanakan dan melalui LKjIP seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam dokumen laporan kami sebelumnya kami sudah membuat Perjanjian Kinerja, kemudian anggaran dan lainnya yang akan kami capai dalam satu tahun tersebut, jadi dari LKjIP yang disampaikan pertahun maka dapat dilihat apa yang harus diperbaiki dari kinerja bappeda dan pengambilan keputusan selanjutnya. Lalu untuk penyampaian kepada masyarakat kami mengupload LKjIP ini di web resmi Bappeda, sehingga masyarakat tau apakah kinerja kami sesuai dengan yang sudah ditargetkan, LKjIP ini pun akan disampaikan kepada bupati”.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas maka dapat dicermati bahwa dalam mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai tugas dan fungsi

<sup>84</sup>Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

<sup>85</sup>Wawancara bersama ibu Yenie Nur Widiastuti, SE,ME selaku Kabid perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan litbang, 25 Januari 2022

<sup>86</sup>Wawancara bersama ibu Irin Pradella, S.AP selaku Staf analisis kepegawaian Bappeda Empat Lawang, 25 Januari 2022

yang diberikan oleh atasan sebagai pihak untuk menyusun RPJMD Kabupaten Empat Lawang, Bappeda sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dimana bentuk pertanggungjawaban mereka terdapat dalam dokumen LKjIP yang memuat target-target yang harus dicapai kinerja dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen laporan ini dibuat setiap tahun untuk disampaikan kepada bupati. Kemudian LKjIP Bappeda Empat Lawang dapat dilihat di web resmi Bappeda Empat Lawang agar dapat tersampaikan kepada masyarakat Empat Lawang atau masyarakat luar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan diantaranya sebagai berikut :

1. Proses Penyusunan RPJMD 2018-2023 Bappeda Empat Lawang telah melalui 6 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang, Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan Penetapan RPJMD. Hal ini sudah berdasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Faktor yang menghambat penyusunan RPJMD 2018-2023 yaitu terbatasnya SDM perencana yang berkualitas, penggunaan teknologi yang tidak dapat maksimal, kurangnya koordinasi antar instansi terutama pada OPD, sarana dan prasarana yang tidak memadai, penataanruangan yang tidak rapi. Sedangkan faktor yang mendukung dalam penyusunan RPJMD yaitu Kerja sama tim yang baik disertai motivasi, inovasi dan pemerian reward dari atasan jika melakukan kinerja dengan baik, disiplin kerja para pegawai, adanya anggaran dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

atau bantuan dana untuk melaksanakan pembangunan dan kelengkapan administrasi dalam penyusunan RPJMD.

3. Kinerja Bappeda dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 jika dilihat dari indikator pengukuran kinerja yaitu Responsivitas, Produktivitas, Kualitas Layanan, Reponsibilitas dan Akuntabilitas bisa dikatakan sudah baik.

Melalui Musrenbang Bappeda Empat Lawang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan mengenai pembangunan Empat Lawang, kemudian pegawai di Bappeda Empat lawang juga telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi nya masing-masing,dalam peyusunan RPJMD penggunaan teknologi tidak dapat maksimal karena banyak masyarakat yang tidak dapat memahami cara penggunaannya, selain itu fasilitas kantor yang dimiliki bappeda juga tidak memadai, namun seiring berjalannya waktu sarana dan prasarana sudah mulai terlengkapi. Karena terbatas SDM maka sistem kerja yang ada di Bappeda Empat Lawang adalah berbentuk kerja sama tim, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, selain itu capaian akuntabilitas bappeda empat lawang juga terdapat dalam bentuk laporan LkjIP yang merupakan dokumen pertanggung jawaban dari bappeda kepada atasan dan masyarakat mengenai kinerja yang telah dicapai dalam waktu satu tahun ”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang disajikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas SDM hendaknya Bappeda selalu melakukan upgrade ilmu, pelatihan, bimtek dan peningkatan kompetensi lain.
2. Lebih meningkatkan Kinerja SDM perencana dalam hal pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencapaian pembangunan di Kabupaten Empat Lawang
3. Hendaknya lebih meningkatkan keefektifan dalam koordinasi antar instansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literature

- Abdurazzaq Hasibuan, *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi*, (Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Achmad S. Rucky, *Sistem Manajemen Kinerja(Perfomance Manajement System)*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2006),
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008)
- Agus Iskandar, Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Kebijaksanaan Dibidang Pembangunan, “ *Keadilan Progresif*”, Vol.3, No.1 (2012)
- Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017)
- Annisa Dwi M, Skripsi : “*Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2015-1017* (Padang : Universitas Andalas, 2018)
- Armosudiro, *Konsep Organisasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- H.M. Syafi’I, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, (Malang: Averroes Press, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

Hesti Dwi Astutik, Skripsi : “ *Optimalisasi Kinerja Bappeda dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partipatif Kota Semarang*”(Semarang :Universitas Negeri Malang, 2020)

Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011)

Mangkunegara, Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cetakan ke-2 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2002)

Muhamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2006)

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*( Jakarta: Kencana,2017)

Nur Sulhana Ali, Skripsi : “*Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Makassar*” (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2018)

Ronny Hatinijo Soemetro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985)

Ribut Rahayu, Mohamad Makmur dan Endah Setyowati, Kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3, No.1 (2017)

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS, 2014)

Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar,2009)

Setiadi Miranda, Skripsi : *Analisis Tugas dan Fungsi Bappeda terhadap pelaksanaan koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bener Meriah* ( Medan: Universitas Medan Area, 2018)

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 2014. Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta, 2014)

*Syamil Qur'an, Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema)

Syamsidar, Skripsi :” *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kota Makassar*”(Makassar :Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Fri Wahyu, *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik*, (Jambi: Skripsi : 2012)

Yuwono, Sonny dkk, *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2007)

Yeremias Tias & Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep ,Teori dan isu*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004)

Gusti Zulkarnain Tompo, *Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan*, “*Jurnal Ilmu Pemerintahan*” Vol.5, No.1. 2012.

## **B. Undang-Undang**

KEPRES No. 27 tentang *Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia*, Tahun 1980.

PERDA Kabupaten Empat Lawang No.1 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang*. Tahun 2019.

PP No.8 tentang *Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah*. Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 25 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Tahun 2004.

Dokumen Renstra 2018-2023 Bappeda Empat Lawang

Dokumen RKPD 2019 Bappeda Empat Lawang

Dokumen LKjIP 2020 Bappeda Empat Lawang

## **C. Lain-lain**

<http://indraachmadi.blogspot.com/2012/04/kinerja-organisasi.html> di akses pada tanggal 18 september 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-6627/D.II.1/PP.00.11/12/2021 Jambi, 28 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pengesahan Judul Proposal Skripsi

Kepada Yth.  
Sdr/i. Bella Wahyuni Sari  
NIM. 105180017

Mahasiswa Fak.Syariah UIN STS Jambi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Bersama ini kami beritahukan bahwa judul dan proposal yang saudara ajukan, setelah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dapat kami terima dengan judul :

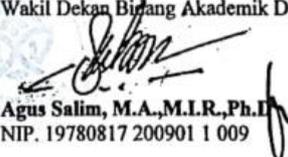
**Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.**

Dengan proposal terlampir.

Demikianlah surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

  
Agus Salim, M.A., M.L.R., Ph.D.  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan:

1. Yth. Dekan Fak. Syariah UIN STS Jambi;
2. Yth. Pembimbing I, Bapak/Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I
3. Yth. Pembimbing II, Bapak/Ibu Nofi Nurman, S.Pd., M.Si
4. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## Lampiran 2

### Daftar Informan :

No	Nama	Jabatan
1.	Yulius Sugiantara, SE,M.SI	Kepala Bappeda
2.	Irma Dewi Anggaraini.S.Si MMG.MURP	Sekretaris
3.	Yenie Nur Widiastuti,SE.,ME	Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Litbang
4.	Wika Patriana Butsi,SE	Kasubid Pengendalian dan Pelaporan
5.	Irin Pradella, S.AP	Staf analisis kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana tahapan/proses persiapan penyusunan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023 ?
2. Dimulai sejak kapan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Empat Lawang 2018-2023 dan bagaimana proses rancangan awal RPJMD ?
3. Bagaimana proses penyusunan rancangan RPJMD ?
4. Apakah dalam penyusunan RPJMD kabupaten empat lawang juga melakukan pelaksanaan Musrenbang ?
5. Kapan Musrenbang ini dilaksanakan dan pihak mana saja yang terlibat ?
6. Apa tujuan dilaksanakan Musrenbang di Kabupaten Empat Lawang ini ?
7. Pihak mana saja yang terlibat dalam musrenbang dan berapa lama musrenbang ini dilakukan ?
8. Bagaimana proses perumusan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Empat Lawang ?
9. Bagaimana proses penetapan RPJMD Kabupaten Empat Lawang setelah melauli beberapa tahapan ?
10. Apakah Bappeda dalam menjalankan tugasnya juga bekerjasama dengan instansi pemerintah lain ?
11. Bagaimana resposivintas bappeda empat lawang dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 ?
12. Apakah bappeda empat lawang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ?
13. Bagaimana tingkat produktivitas bappeda dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 ?
14. Bagaimana kualitas pelayanan bappeda empat lawang dalam penyusunan RPJMD?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

15. Apakah sarana dan prasarana penunjang pelayanan sudah memadai ?
16. Bagaimana responsibilitas bappeda empat lawang dalam penyusunan RPJMD 2018-2023, apakah sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar?
17. Apakah pegawai bappeda sudah melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing?
18. Bagaimana bentuk akuntabilitas bappeda empat lawang ?
19. Kepada siapa LkjIP di sampaikan ?
20. Bagaimana LkjIP tersebut tersampaikan kepada masyarakat?
21. Bagaimana cara instansi dalam menanggapi keluhan-keluhan dari rakyat ?
22. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung bappeda dalam penyusunan RPJMD?
23. Bagaimana kelengkapan administrasi bappeda dalam penyusunan RPJMD?
24. Bagaimana koordinasi antar unit di bappeda ?
25. Bagaimana koordinasi dengan instansi lain pada penyusunan RPJMD?
26. Bagaimana upaya kepala bappeda dalam menghadapi keterbatasan SDM ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



**Gambar 1** :Wawancara bersama bapak Yulius Sugiantara, SE.,M.SI selaku Kepala Bappeda Kabupaten Empat Lawang



**Gambar 2** :Wawancara bersama ibu Yeni Nur Widiastuti, SE.,ME selaku Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Litbang



**Gambar 3** : Wawancara bersama ibu Irma Dewi Anggraini, S.Si MMG.M.URP selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Empat Lawang



**Gambar 4** : Wawancara bersama ibu Wika Patriana Butsi, SE selaku Kasubid Pengendalian dan Pelaporan



**Gambar 5** : Wawancara bersama ibu Irin Pradella, S.AP selaku staff analisis Kepegawaian

## CURICULUM VITAE



**A. Biodata Pribadi**

Nama : Bella Wahyuni Sari  
Nim : 105180017  
Tempat/Tanggal Lahir : Mulyoharjo, 27 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ilmu Pemerintahan  
Universitas : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Alamat Universitas : Jln. Jambi – Ma. Bulian, KM 16 Simp. Sei Duren  
KabMuaro Jambi, Indonesia  
Agama : Islam  
Tinggi/Berat Badan : 147 cm /40 Kg  
Golongan Darah : B+  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Sekarang : Perumahan Laskar Amuntai, Blok J  
Alamat Asal : Desa Mulyoharjo, Kec.BTS Ulu, Kab. Musi Rawas  
E-mail : bellawahyuni2027@gmail.com  
No Tlp/Wa : 082281269405

### B. Riwayat Pendidikan

- SDN 2 Mulyoharjo : 2006-2012
- SMPN Mulyoharjo : 2012-2015
- SMAN Raksa Budi : 2015-2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi